

SKRIPSI

**EVALUASI KINERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA
BANJIR DI DESA PANAKKUKANG KECAMATAN
PALLANGGA KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2023**

SKRIPSI

**EVALUASI KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI
DESA PANAKKUKANG KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**

Sebagai salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR FITRIANI

Nomor Induk Mahasiswa: 105641105219

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

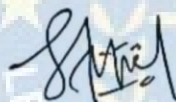
Nama Mahasiswa : Nur Fitriani

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105219

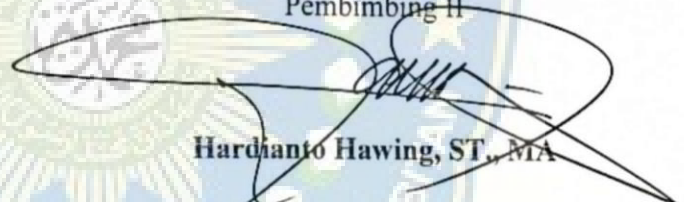
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Hamrun, S.IP., M. Si

Pembimbing II

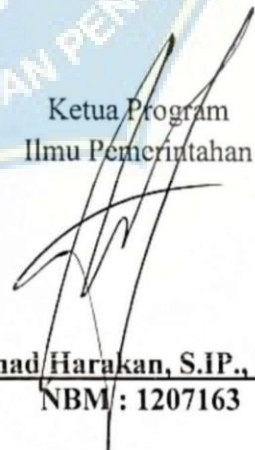

Hardianto Hawing, ST., MA

Mengetahui:

Dekan
Fisip Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyana Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 703727

Ketua Program
Ilmu Pemerintahan


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM : 1207163

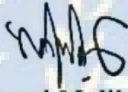
HALAMAN PENERIMAAN TIM

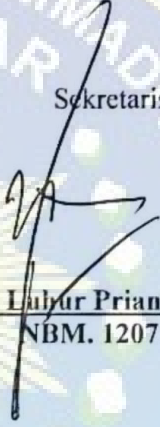
Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 0175/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu, 16 Agustus 2023.

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Lulur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 1207163

TIM PENGUJI

1 Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

()

2 Hamrun, S.IP. M.Si

()

3 Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Fitriani
Nomor Induk Mahasiswa : 105641105219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Juli 2023

Yang Menyatakan



Nur Fitriani

ABSTRAK

Nur Fitriani, Hamrun. Hardianto Hawing. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Kinerja BPBD Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara dan observasi langsung lapangan, informan terdiri dari lima orang dan jenis data sekunder berupa hasil dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja BPBD dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah berjalan efektif karena dapat meminimalisir dari dampak yang diakibatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi banjir di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang diukur menggunakan indikator Kinerja menurut Mangkunegara yang terdiri yaitu : 1) Kualitas Kerja, Sejahter ini kualitas dari BPBD tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada dan menunjukkan kesiapan dalam memberikan sebuah layanan. 2) Kuantitas Kerja, dalam hal ini pegawai BPBD sudah melaksanakan tugasnya dengan cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Pelaksanaan Tugas, BPBD dan pihak terkait telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 4) Tanggung Jawab, BPBD bertanggung jawab akan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diimplementasikan.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, BPBD, Mitigasi Banjir

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang Tua tercinta, Saharuddin dan Yurmiati Tabris yang rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik, serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberikan dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.
2. Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing, ST., MA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen dan seluruh Jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan dimulai dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Pihak Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian, para Staf Pegawai Kantor BPBD yang telah membantu memberikan informasi dan juga data-data yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas bantuan dalam proses penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak kantor Kecamatan Pallangga dan Kantor Desa Panakkukang yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama proses penelitian serta bersedia bekerjasama selama berlangsungnya penelitian ini.
8. Kepada saudari tercinta Nuralam dan Nuraeni Fadilla yang selalu menyayangi dan memberikan doa kepada penulis serta segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan sampai selesainya skripsi ini.
9. *Epecially* untuk saudara-saudara saya Siti Nabila RMN, Siti Khadijah, Resky Anadewi, Nurul Azizah dan sahabat terbaik saya Sulfyanti, Dewi Fourtuna A.M.Nur, Marwah Yunida Alamin, Aglia Maydiarni yang telah senantiasa

memberikan dukungan dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 6 Juli 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Fitriani', is written over the watermark logo.

Nur Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian.....	20
E. Deskripsi Fokus	21
BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian	22
C. Sumber Data	23

D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	25
G. Keabsahan Data	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	28
B. Hasil Penelitian.....	39
C. Pembahasan Penelitian	68
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Gowa.....	2
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir.....	20
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Desa Panakukkang.....	38
Gambar 3.4 Mekanisme dan Prosedur Penanganan Bencana.....	69
Gambar 3.5 Mekanisme Prosedur Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana.....	70
Gambar 3.6 Mekanisme Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rangkaian Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian	24
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Panakukkang	34
Tabel 3.3 Jumlah Kepala Kepemimpinan Desa Panakukkang	35
Tabel 3.4 Indikator Penilaian Evaluasi Terhadap Kinerja BPBD	41
Tabel 3.5 Daftar Kegiatan/Program dan Pagu Anggaran BPBD.....	46
Tabel 3.6 Jumlah Pencapaian Evaluasi Terhadap Kinerja Pegawai BPBD	48
Tabel 3.7 Jumlah Program Mitigasi Bencana Banjir	52
Tabel 3.8 Jumlah Data Kejadian Banjir Tahun 2019-2020	58
Tabel 3.9 Daftar Realisasi Fisik BPBD	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong rawan terhadap kejadian bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan suatu kondisi fenomena bencana alam yang mempunyai hubungan dengan jumlah kerusakan terhadap sisi kehidupan dan material (Nurdin & G, 2020). Banjir merupakan problematika besar yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali untuk wilayah daerah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa memiliki kondisi geografis, hidrologis, geologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi (Cahyadi, 2018).

Wilayah Kabupaten Gowa yang terdiri dari dataran tinggi, daerah tepi pantai memiliki daerah yang lembab dan rawan banjir. Kabupaten Gowa juga dilintasi banyak sungai dan muara, seperti Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo (Wulandari, 2020). Kabupaten Gowa mengalami banjir yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Gowa yaitu Somba Opu, Bontomarannu, Pattalassang, Parangloe, Pallangga, Tompobulu, dan Manuju. Banjir tersebut diakibatkan hujan deras yang menambah volume air sungai meningkat hingga mengakibatkan kawasan disekitarnya terendam banjir (Abd. Akbar, Amir Tjoneng, 2021).

Hal ini telah dibuktikan dalam kasus banjir yang terjadi di Kabupaten Gowa pada awal tahun 2019, dimana aliran dari Sungai Jeneberang yang meluap dan Sungai Jenelata yang meredam 11 dari Kecamatan dengan jumlah pengungsi sebanyak 3.534 jiwa. Curah hujan pada akhir bulan Desember tahun 2018 mencapai 787 mm dan bulan Januari tahun 2019 sebesar 784 mm yang sangat tinggi dibandingkan dengan curah hujan normal, hanya dalam beberapa hari batas Sungai Jeneberang dan Sungai Jenelata tidak dapat lagi menampung volume air hujan yang besar. (<http://gowakab.go.id>).

Gambar 3.1 Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Gowa



Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Gowa

Sumber: Arsip Data BPBD

BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) mencatat jumlah bencana pada Januari 2019 sebanyak 366 kejadian. Salah satunya adalah Kabupaten Gowa yang menelan 2.216 jiwa dan 604 rumah terendam banjir, dampak banjir terparah yaitu di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga (BNPB, 2019). Desa Panakukkang merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Desa Panakukkang merupakan salah satu desa yang sering terkena banjir setiap tahunnya apalagi musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Desa Panakukkang beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata 23°C-30°C sepanjang tahun, yang dimana curah hujan mencapai rata-rata 200mm-300mm per tahun dan tertinggi pada bulan Desember sampai dengan Februari. Banjir menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian bisa berupa korban manusia dan harta benda sehingga mengganggu bahkan melumpuhkan kegiatan sosial-ekonomi penduduk maupun berdampak pada aktivitas berbagai aspek berupa pendidikan, perkantoran, perdagangan dan lainnya (Syarif, 2021).

Pada akhir bulan Desember tahun 2018, cuaca serta curah hujan cukup tinggi dan melanda Kabupaten Gowa. curah hujan yang terus menerus terjadi hingga pembukaan awal tahun 2019. Pada bulan Januari inilah merupakan puncak terjadinya banjir dan berdampak ke beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang terparah yaitu di Desa Panakukkang. Ada beberapa wilayah dusun yang terkena dampak banjir salah satunya adalah Dusun Parangmalengu.

Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa kerap mengalami musibah banjir setiap tahunnya, bahkan ketinggian air bisa mencapai dua meter. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut berada pada di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini sudah mengalami penyempitan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada Kabupaten Gowa, yang mengatur segala pelaksanaan penanggulangan bencana baik dimulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana maupun tahap pasca bencana. Titik berat penanggulangan bencana hanya pada fase tanggap darurat. Sebagai akibatnya, penanggulangan bencana belum efektif. Pada fase prabencana kurang mendapatkan perhatian, dan bencana selalu terjadi ketika masyarakat tidak siap. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana (Nurfatihah, 2019).

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menyatakan bahwa mitigasi merupakan rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik itu melalui penyadaran, pembangunan fisik dan peningkatan terhadap kemampuan untuk menghadapi ancaman dari bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Kabupaten Gowa sebagai *leading sector* kebencanaan di wilayah.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdapat dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan bahwa manajemen penanggulangan bencana daerah itu meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, respon atau daya tanggap, serta pemulihan. Selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gowa di koordinir oleh BPBD Kabupaten Gowa. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana terjadi. Melihat potensi bencana di Kabupaten Gowa, keberadaan pelayanan pra/sebelum bencana sangat penting. Hal ini karena dengan penyelenggaraan pelayanan sebelum bencana ini, setidaknya ada tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana (Suartini et al., 2014).

Manajemen bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan saat sebelum terjadi bencana melakukan kegiatan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan yang wilayah sering terdampak bencana terutama banjir. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan saat bencana terjadi ialah membangun posko siaga bencana, membuat dapur umum untuk masyarakat yang terdampak banjir di beberapa titik yang telah ditentukan dan Dinas Sosial dimintanya untuk turun memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilakukan saat sesudah bencana Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pendataan dan merekap jumlah kerugian terjadi.

Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana banjir yang terjadi di wilayah Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kinerja dari BPBD Kabupaten Gowa selaku instansi atau lembaga pemerintah yang bergerak di sektor/ bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan dari peristiwa banjir yang terjadi di Desa Panakukkang terkait dengan permasalahan kinerja BPBD Kabupaten Gowa dalam mitigasi banjir yaitu, Kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya mitigasi banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kesadaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk menghindarkan diri dari bahaya bencana (Amelia, 2019). Dalam hal ini kesadaran masyarakat harus dibina melalui program mitigasi bencana.

Mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Gowa yang menjalankan fungsi koordinasi dengan lintas sektor sebelum bencana banjir harus terus dilakukan dan ditingkatkan, mengingat dari tahun ketahun dampak yang ditimbulkan cukup meningkat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir. Dalam hal penanggulangan bencana, upaya mitigasi banjir dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana banjir. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku instansi atau lembaga pemerintah yang bergerak di sektor/ bidang

penanggulangan bencana dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis judul penelitian sebagai berikut: “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjawab dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui evaluasi dari Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari kinerja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi penyelenggara penanggulangan bencana dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya tentang bagaimana evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat mengenai kinerja BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu penelitian ini, diperlukan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang dimaksud yakni:

Tabel 2.1. Rangkaian Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
(Suartini et al., 2014)	Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung Dalam Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kinerja di BPBD Kabupaten Badung secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kabupaten Badung di setiap akhir tahun anggaran. Dilihat dari segi indikator kinerja yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, BPBD Kabupaten Badung dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di tahun 2014 dapat dikatakan telah berhasil dengan kinerja yang

Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		<p>cukup memuaskan. Namun hal tersebut di atas masih memerlukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap segala program yang telah dilaksanakan.</p>
(Awusi et al., 2018)	<p>Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Manado dalam pencapaiannya sebesar 70 % dari yang diharapkan. Hal ini di dapat berdasarkan pada hasil penghitungan perbandingan antara jumlah data yang terkumpul. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Diantaranya permasalahan terkait dengan alat/sarana yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan data tingkat kinerja indikator alat/sarana yaitu didapatkan hasil sebesar 65 %. Ini menggambarkan bahwa tingkat persetujuannya masih rendah dari yang diharapkan 65 % yang menunjukkan</p>

Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		bahwa masih minimnya alat/sarana penanggulangan bencana banjir. Ditambah
(Nurillah et al., 2022)	Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana melalui pendekatan manajemen mitigasi bencana di Kabupaten Ciwandan telah dilakukan meskipun ada sebagian dari tahapan yang dilakukan masih belum efektif.

Penelitian pertama lebih berfokus terhadap pengukuran kinerja dari BPBD tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Penelitian kedua, memfokuskan terhadap indikator kinerja yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kota Manado yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi BPBD. Sedangkan bagi penelitian ketiga, lebih berfokus pada pelaksanaan fungsi manajemen mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bahaya banjir.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, bahwa penelitian diatas memiliki persamaan pada penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai kinerja dari BPBD dalam melakukan upaya mitigasi banjir. Namun, dalam penelitian ini yang membedakan adalah variabel yang dipakai, metode yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda dengan sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja disebut juga "*Performance Evaluation*" atau "*Performance Appraisal*". Appraisal berasal dari kata Latin "*appratiare*" yang berarti memberikan harga atau nilai. Evaluasi kinerja berarti memberi nilai pada pekerjaan seseorang untuk diberikan penghargaan, kompensasi. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

Evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Payaman J. Simanjuntak (2005:103) merupakan suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas individu maupun kelompok atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan dari hasil pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu proses yang dapat digunakan oleh pemimpin untuk menentukan hasil prestasi kerja seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya atas tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Selain itu, evaluasi kinerja juga merupakan suatu

proses penilaian terhadap kinerja aparatur yang dilakukan agar untuk melihat tanggung jawab yang diberikan setiap hari, apakah terjadi peningkatan atau malah mengalami penurunan sehingga dapat memberikan suatu motivasi dari penunjang untuk melihat kinerja birokrasi kedepannya.

Menurut Wirawan (Mahpudin, 2021) menyatakan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses melakukan penilaian mengenai kinerja yang didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkan standar kerjanya secara periodik untuk membantu pengambilan keputusan. Berdasarkan dari beberapa pendapat yang di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan sebuah proses penilaian terhadap kerja individu dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadu tugas dan tanggung jawabnya dengan membandingkan antara standar kinerja atau kriteria yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja merupakan suatu bentuk penilaian terhadap hasil kerja atau suatu proses lanjutan setelah mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan untuk mencapai apa yang diinginkan atau tidak, dan dengan evaluasi kinerja ini dapat mengambil keputusan untuk kedepannya (Nasution & Sinaga, 2017). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dapat di evaluasi oleh tingkat kinerja pegawainya.

Adapun beberapa indikator kinerja pegawai yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pegawai dalam mencapai sasaran organisasi. Mangkunegara (Septian, 2021) mengemukakan dan menguraikan bahwa ada 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Kualitas Kerja

Kualitas kerja yaitu seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

b. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

c. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas merupakan seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

2. Konsep Bencana Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi saat selama musim hujan yang meliputi potensi daerah, terutama pada sungai atau kanal yang relatif landai. Selain itu, banjir juga bisa terjadi akibat naiknya air karena intensitas hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul yang rusak, dan sumbatan aliran air di lokasi lain. Banjir juga dapat menjadikan penyebab kerusakan besar pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Maryono (Fahlevi, 2019) menjelaskan banjir yang terus berlangsung di Indonesia disebabkan oleh empat hal yaitu faktor hujan yang lebat, penurunan resistensi DAS terhadap banjir, kesalahan pembangunan alur sungai dan pendangkalan sungai. Faktor hujan merupakan faktor alami yang dapat menyebabkan banjir namun faktor ini tidak selamanya menyebabkan banjir karena tergantung besar intensitasnya. Banjir adalah salah satu fenomena alam yang merupakan bagian dari siklus iklim.

Banjir merupakan peristiwa yang biasa terjadi, kemudian pada saat itu menjadi masalah bencana, jika air banjir mengganggu kehidupan, penghidupan dan keselamatan manusia. Menurut Suripin (Wahyuni, 2019) penyebab banjir dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu antara lain:

- 1) Banjir kiriman yaitu aliran banjir yang datang dari daerah hulu di luar kawasan yang tergenang. Hal ini terjadi jika hujan yang terjadi di daerah hulu menimbulkan aliran banjir yang melebihi kapasitas sungainya atau banjir kanal yang ada, sehingga mengakibatkan terjadinya limpasan.
- 2) Banjir lokal (banjir genangan) adalah genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Pada banjir lokal, ketinggian genangan air antara 0,2 – 0,7 m dan lama genangan 1-8 jam. Banjir ini terdapat pada daerah yang rendah.
- 3) Banjir rob (banjir air pasang) yaitu banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung air pasang dan/ atau air balik dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang.

Dari beberapa implikasi banjir yang ada dapat dibedakan menjadi tiga cakupan yaitu, *Pertama*, Implikasi Fisik dapat berupa fisik alami dan fisik bangunan. *Kedua*, Implikasi Sosial berupa terganggunya kegiatan masyarakat baik di bidang pendidikan, komunikasi, maupun kesehatan. *Ketiga*, Implikasi Ekonomi yang berupa dapat mengganggu perekonomian masyarakat.

3. Konsep Mitigasi Bencana

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah segala upaya pencegahan, seperti strategi pengurangan risiko jangka panjang, yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Baik perencanaan maupun pelaksanaan langkah-langkah untuk menurunkan risiko yang terkait dengan bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, serta persiapan untuk bencana yang sebenarnya, termasuk dalam kategori mitigasi bencana. Saat bencana banjir melanda, segala sesuatunya perlu dilakukan dengan cepat. Untuk memastikan pengelolaan dan evakuasi saat banjir berjalan lancar, diperlukan perencanaan, koordinasi, dan pelatihan yang memadai.

Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana banjir, yaitu sebagai berikut:

a. Sebelum banjir

Banjir memang tidak bisa sepenuhnya dihindarkan, namun masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya banjir dan menguranginya dengan melakukan upaya pencegahan yang dilakukan 2-3 bulan sebelum musim badai.

b. Saat terjadi banjir

Penanganan saat banjir merupakan tindakan yang harus segera dilakukan. Hal ini tentunya untuk menyelamatkan nyawa dan mengamankan harta benda saat terjadi banjir. Dalam tindakan darurat, waktu merupakan faktor yang sangat penting karena waktu

dapat menentukan jumlah jiwa atau harta benda yang dapat diselamatkan. Perencanaan yang hati-hati sebelum banjir terjadi adalah kegiatan awal yang penting untuk menangani banjir pada saat waktu yang tepat dan efektif. Berikut beberapa penanganan terhadap banjir atau tindakan kegiatan pengungsian yakni terdiri dari: *Pertama*, Badan koordinasi yang baik. *Kedua*, Pencarian dan penyelamatan. *Ketiga*, melindungi pemukiman masyarakat dan yang *Keempat*, Mengungsi ketempat yang lebih aman.

c. Pemulihan setelah banjir

Tujuan dari tindakan terhadap pemulihan tersebut adalah agar mendukung masyarakat untuk kembali hidup yang normal dan membangun kembali lingkungan serta kehidupan sosial-ekonomi dari masyarakat. terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan yakni:

- 1) Tindakan pada jangka pendek yaitu dilakukan untuk mengembalikan layanan utama kepada masyarakat dan mencukupi semua kebutuhan pokok masyarakat baik dari kalangan menengah maupun kebawah.
- 2) Tindakan pada jangka panjang yaitu dilakukannya agar mengembalikan keadaan masyarakat ke kondisi normal kembali (lebih baik).

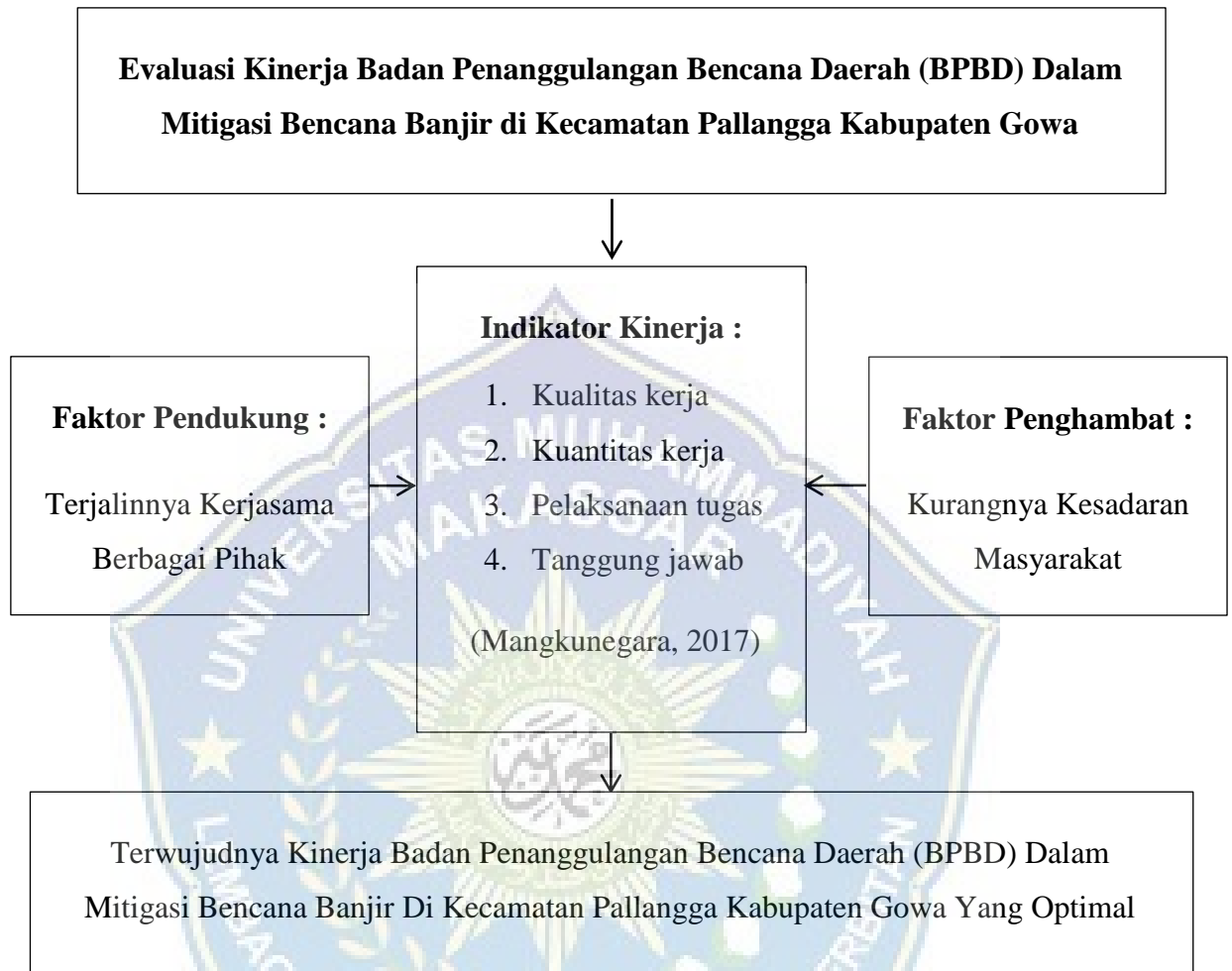
Masa pemulihan, terutama dalam memberikan kemungkinan untuk tindakan mitigasi banjir kepada masyarakat seperti memastikan bahwa rumah baru terhubung ke sistem drainase atau menahan diri dari membangun apa pun di lokasi yang berada pada kawasan dataran banjir. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, masyarakat harus mau berpartisipasi dalam proses pemulihan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dalam penanggulangan bencana banjir, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka pikir.

Dalam penelitian ini peneliti memakai teori dari Mangkunegara (Septian, 2021) yaitu indikator kinerja. Indikator yang digunakan tersebut meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, tanggungjawab untuk menjawab masalah yang terjadi dalam penelitian ini tentang bagaimana evaluasi kinerja dari BPBD di Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta bertanggung jawab akan tupoksi yang diberikan. Teori ini juga membantu peneliti untuk melihat apakah BPBD sudah melakukan kerjanya dengan baik.

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan menggunakan indikator kinerja menurut Mangkunegara, meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

E. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kualitas kerja adalah setiap pegawai pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa harus mencerminkan seberapa baik dalam menyelesaikan pelaksanaan mitigasi bencana banjir
2. Kuantitas kerja adalah pegawai pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa yang terlibat dalam melakukan upaya mengurangi resiko banjir harus bekerja dengan cermat dan benar.
3. Pelaksanaan tugas adalah setiap pegawai pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa yang melakukan mitigasi bencana banjir harus mampu melaksanakan pekerjaannya dengan tepat dan akurat.
4. Tanggung Jawab adalah pegawai pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa yang melakukan pelaksanaan mitigasi bencana banjir harus mempunyai kesadaran yang dimiliki terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar dapat memastikan pekerjaan tersebut diselesaikan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan yakni pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa. Peneliti melakukan pelaksanaan penelitian ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yakni evaluasi kinerja dari BPBD dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat mendalam, terhadap sebuah permasalahan dari suatu keadaan yang kompleks dan penuh dengan makna. Artinya, data yang dikumpulkan bukan hanya berupa angka-angka melainkan hasil data dari naskah wawancara, laporan dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya.

2. Tipe Penelitian

Pemilihan tipe penelitian yang sangat tepat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan juga lengkap dalam memecahkan suatu masalah. Sesuai dengan permasalahannya, tipe yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) tentang keadaan atau kejadian yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada kinerja yang dilakukan BPBD dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa. Dasar dari penelitian ini adalah memberikan wawancara, yaitu melalui interview atau dialog kepada informan berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan objek penelitian yang dilakukan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh sebuah data yang diperlukan selama melakukan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten dengan pelaksanaan penelitian ini dalam hal ini berkaitan dengan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan upaya mengurangi resiko bencana banjir di Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil dokumentasi, melalui media online, jurnal dan dokumentasi lainnya yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penulis mencoba untuk menggali data melalui beberapa informan yang ada sebagai narasumber.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Ikhsan Parawansa, M.Si	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1 Orang
2.	Salahuddin, S.Stp	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid II)	1 Orang
3.	Kaharuddin, S.Sos	Staf Pegawai Personil Damkar Kab. Gowa	1 Orang
4.	Mahsyur, S.E	Staf Pegawai Kecamatan Pallangga	1 Orang
5.	Saipuddin R, S.Sos	Sekretaris Desa Panakukkang	1 Orang
6.	Sunarsi	Masyarakat Desa Panakukkang Terdampak Banjir	1 Orang
Total			6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan pengetahuan dan fenomena yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara sesi tanya jawab dengan pihak yang berkaitan yaitu pegawai yang terlibat langsung serta berhubungan dengan data yang diperlukan peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan proposal.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian metode Kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai

tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2007).

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh didalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification*

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Keabsahan Data

Uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas adalah bagian dari uji keabsahan data. Enam komponen tes kredibilitas adalah menumbuhkan ketekunan, meningkatkan pengamatan, menganalisis situasi negatif, menggunakan bahan referensi, dan memeriksa anggota. Triangulasi adalah salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk menilai keandalan data.

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, dimungkinkan untuk menilai kebenaran informasi.
2. Triangulasi teknik, yakni melibatkan pengukuran atau evaluasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode untuk menilai keandalan data.
3. Triangulasi waktu, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari nara sumber yang sama dengan menggunakan teknik metode yang sama pada berbagai waktu dan dalam berbagai kondisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Gowa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat Nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amatur Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga penanggulangan bencana sebelumnya, yakni Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai komando dan koordinasinya di daerah di bubarkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh pemerintah pusat (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) yang kedudukannya merupakan lembaga pemerintah Non Departemen setingkat Menteri (pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sementara itu Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh pemerintah Daerah (pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (pasal 20 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Sementara itu tugas-tugas BPBD ada Sembilan buah 9 (pasal 21 UU No. 24 Tahun 2007) yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai aturan perundang-undangan (dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf I perda No 25 Tahun 2011).

Secara teknis pembentukan BPBD di atur dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Perkar (Perka) BNPB No 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan meski mengikuti tata aturan dari kementerian dalam Negeri yang membentu kepala daerah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pertimbangan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melalui peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dan peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi leading sector penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa terdiri atas yakni : Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bnecana Daerah Kabupaten Gowa

a) Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yakni

“Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tanggap, tangkas, dan tangguh serta berdaya saing dengan tata kelola kebencanaan yang lebih kuat”

b) Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yakni

1. Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur dalam penguasaan teknologi dalam penanggulangan bencana
2. Mengembangkan sistem informasi manajemen penanggulangan bencana berbasis teknologi
3. Mengembangkan dan melaksanakan pemulihan dari dampak bencana sesuai dengan standar operasional prosedur SOP Penanggulangan Bencana
4. Mengembangkan dan meningkatkan peran stakeholders, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dunia usaha, kesetaraan gender, dan disabilitas dengan memperhatikan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
5. Menyelenggarakan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi terpadu dan komprehensif.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GOWA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
GOWA NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BPBD**

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



2. Gambaran Umum Desa Panakukkang Kabupaten Gowa

a. Sejarah Desa Panakukkang

Secara historis, desa panakkukanag dahulu adalah hasil pemekaran dari DesaTinggimae. Oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang memberikan nama Panakukkang yang di ambil dari nama salah satu benteng Kerajaan Gowa yang berada di Barombong. Karenanya, nama panakkukang berawal dari nama kumpulan tiga kampung Parangma“lengu, Kampung Pajalau dan Kampung Bonto Biraeng yang kemudian diberi nama Dusun Panakkukang.

b. Letak Desa Panakukkang

Secara administrasi Desa Panakukkang terletak di wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Wilayah Desa Panakukkang secara administratif dibatasi oleh wilayah-wilayah desa0desa tetangga yakni antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Desa Pallangga dan Desa Bunga Ejaya
- 2) Sebelah Selatan : Desa Bontosunggu dan Desa Maradekaya
- 3) Sebelah Barat : Desa Bontosunggu dan Desa Panciro
- 4) Sebelah Timur : Desa Julukanaya dan Desa Julubori

Luas wilayah Desa Panakkukang adalah 1,69 km² dan jarak dari pusat kota yakni Kecamatan Pallangga adalah 4 km². Desa Panakkukang memiliki 5 Dusun yaitu Dusun Kunjungmange, Dusun Bontobiraeng, Dusun Pajalau, Dusun Parangma“lengu ditambah dengan Dusun

Bontocinde sebagai dusun persiapan pemekaran dari Dusun Kunjungmange.

c. Penduduk Desa Panakukkang

Desa Panakukkang berpusat di Dusun persiapan Bontocinde, adapun jumlah penduduk di Desa Panakukkang pada tahun 2021 berkisaran 6.075 jiwa dimana masyarakat dominan beragana islam dengan bermata pencaharian rata-rata sebagai petani.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Panakukkang Tahun 2021

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.012 Jiwa
2.	Perempuan	3.063 Jiwa
	Jumlah	6.075 Jiwa

Sumber : Data SDGs Desa Panakukkang 2021

Berdasarkan dari jumlah Rukum Tetangga (RT) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.012 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 3.063 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.406 KK dengan mata pencaharian sebagai petani (Padi, jagung, dan sayur) Buruh, pedagang, dan pegawai negeri sipil, wiraswasta, TNI-Polri dan tenaga kesehatan. Dengan penganut agama islam 100%.

d. Iklim atau Cuaca

Secara umum Desa Panakukkang beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata 230C – 300C sepanjang tahun dimana curah hujan mencapai rata-rata 2000mm –3000mm per tahun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari. Desa Panakukkang juga mengalami dua musim yakni antara lain: Musim hujan yang berlangsung antara bulan Oktober sampai Bulan April dan Musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan September

e. Kepemimpinan Desa Panakukkang

Desa Panakkukang terbentuk sejak tanggal 29 September 1989 sebagai Desa persiapan. Kemudian Desa Panakkukang menjadi Desa Defektif pada tahun 1992. Sejak terbentuknya Desa Panakukkang tersebut sudah beberapa kali di pimpin oleh kepala desa yang terpilih yakni:

Tabel 3.3 Kepala Desa Panakukkang periode 1989-2022

No.	Nama Kepala Desa	Periode
1.	H. Abd Rahim Dg. Tuppu	1989-1996
2.	Drs. Hertasning Dg. Kalu	1996-2003
3.	Drs. Hertasning Dg. Kalu	2003-2008
4.	Abd Malik Gassing, BS	2008-2014
5.	Saipuddin R, S.Sos	2014-2017
6.	Zukifli Dg. Pasang	2017-2022

Sumber : Data Sekunder Desa Panakukkang

Desa Panakkukang sudah berumur 26 tahun selama masa terbentuknya pada tahun 1989 yang lalu. Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa Aparat Desa antara lain Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RK dan Ketua RT.

Dalam melakukan aktifitas pelaksanaan tugas, para kaur berkantor setiap hari kerja, namun masih perlu peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah menyangkut tugas dan fungsinya masing-masing antara lain: keterampilan administrasi, pengoperasian komputer, dan teknik pelayanan tugas kepada masyarakat.

Dalam kehidupan warga masyarakat Desa Panakkukang terdapat dua jenis kepemimpinan yaitu: Dalam kehidupan warga masyarakat Desa Panakkukang terdapat dua jenis kepemimpinan yaitu: Pertama, kepemimpinan resmi (*formal leadership*) yaitu kepemimpinan yang terkait dalam suatu jabatan pemerintah, yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan pengurus organisasi. Kedua, kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) yaitu kepemimpinan karena pengakuan yang diberikan oleh masyarakat sehingga orang tersebut di posisikan lebih tinggi oleh masyarakat sehingga orang tersebut diposisikan lebih tinggi oleh masyarakat sehingga orang tersebut diposisikan lebih tinggi oleh masyarakat, mereka ini diantaranya adalah ustad, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Masyarakat yang memiliki keturunan raja, serta orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi (sarjana/sederajat).

Struktur kepemimpinan yang ada pada Desa Panakukkang dapat terlihat bahwa kepemimpinan resmi (*format leardeship*) lebih diakui oleh masyarakat dibanding dengan kepemimpinan tidak resmi (*informal Leadership*). karena seiring dengan perkembangan jaman, warga masyarakat Desa Panakkang sudah mengetahui dan memahami dengan baik bagaimana struktur kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang telah ada, terutama kepemimpinan formal. Sehingga pejabat pemerintah lebih disegani dan lebh di hormati oleh masyarakat. Kepemimpinan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Panakkukang lebih cenderung dan dikuasai oleh kepemimpinan yang resmu ata formal dengan kata lain pejabat pemerintahan atau pegawai pemerintah.

1. Visi dan Misi Desa Panakukkang Kabupaten Gowa

a) Visi Desa Panakukkang Kabupaten Gowa: “Terwujudnya Desa Panakkukang Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Berbasis Pertanian Ekonomi Kerakyatan.”

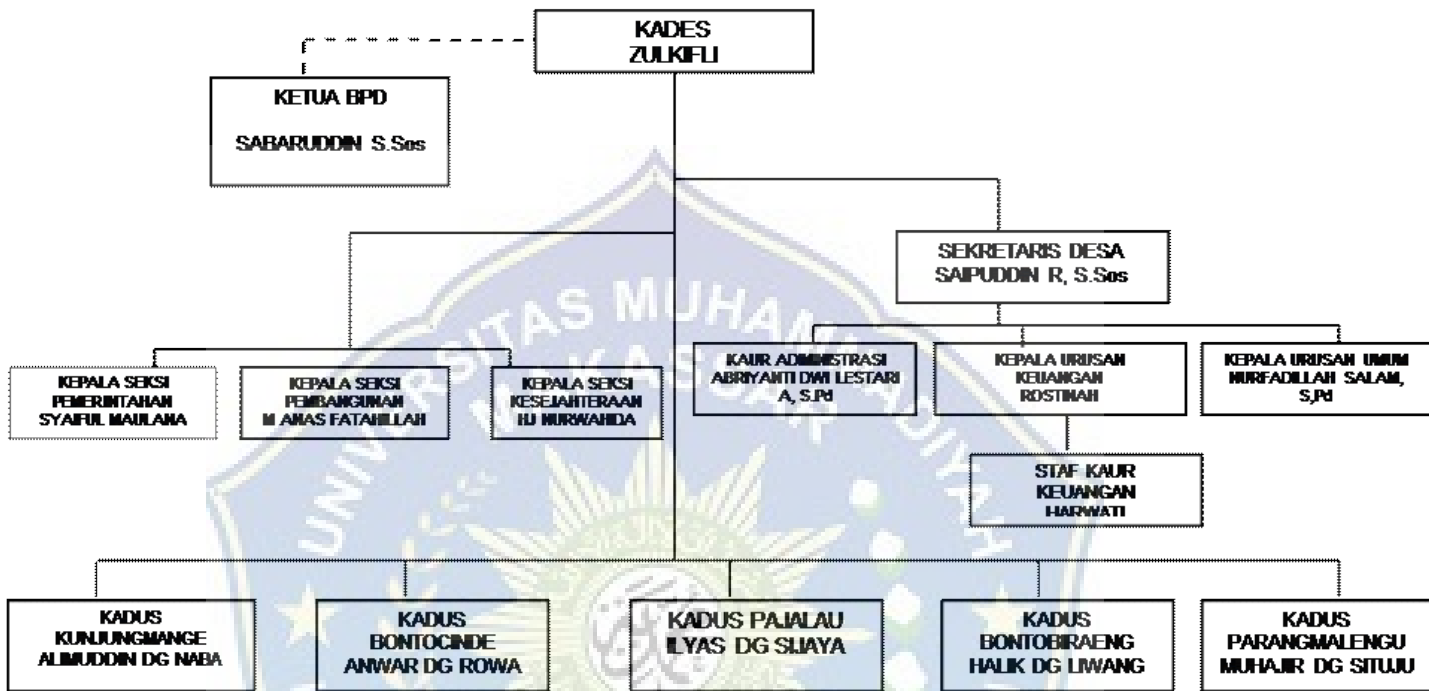
b) Misi Desa Panakukkang Kabupaten Gowa:

- 1) Meningkatkan Hasil Pertanian Melalui Pengembangan Sumber Daya
- 2) Mengembangkan Home Industri (Industri Rumah Tangga)
- 3) Meningkatkan Infrastruktur Pedesaan
- 4) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Desa
- 5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PANAKUKKANG

KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Gambar 3.3. Bagan Struktur Organisasi Desa Panakukkang



B. Hasil Penelitian

1. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Evaluasi kinerja merupakan sebuah proses penilaian terhadap kerja individu dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan membandingkan antara standar kinerja atau kriteria yang telah ditetapkan dan dengan evaluasi kinerja ini dapat mengambil keputusan untuk kedepannya. Dalam mencapai suatu bentuk pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yaitu dengan menggunakan indikator kinerja untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh BPBD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Indikator yang digunakan tersebut meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menurut Mangkunegara (Laia et al., 2021).

a. Kualitas Kerja

Kualitas kerja adalah mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Indikator ini mencerminkan seberapa baik seorang pegawai menyelesaikan pekerjaannya dalam melakukan mitigasi. Konsep kualitas atau mutu

dipandang sesuatu yang relatif, tidak selalu mengandung arti yang bagus, baik, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekaligus ketua pelaksana BPBD terkait dengan evaluasi kinerja dalam mitigasi banjir di desa panakukkang kecamatan pallangga kabupaten gowa beliau mengemukakan:

“Berbicara soal evaluasi kinerja yang dimana merupakan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gowa ini dimulai dari tahap perencanaan kerja. Dalam proses perencanaannya mulai dari visi misi Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA inilah yang bercerita tentang strategi dari masing-masing SKPD (Termasuk BPBD disini) dan biasanya dalam kurun waktu 5 tahunan dalam satu 1 periode. Dilihatlah evaluasi kinerja dari RENJA itu sendiri yang tertuang nanti, baik terkait dengan apa sasarannya yang dimulai dari program kerja apa yang dilakukan dalam lima tahun dalam bentuk RENSTRA ini dan nantinya di nilai dalam bentuk RENJA bahkan dalam bentuk peresentase berapa dari kinerja nya masing-masing.” (Hasil Wawancara IP, 6 Juni 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa evaluasi kinerja sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gowa. Evaluasi dimulai dari tahap perencanaan dengan merujuk pada visi misi Bupati yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang memuat strategi SKPD dalam periode 5 tahun.

Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) yang mencakup program-program kerja serta penilaian kinerja dalam bentuk persentase pencapaian. Dengan demikian, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan visi misi yang ditetapkan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 3.4 Indikator Penilaian Evaluasi Terhadap Kinerja BPBD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Indeks Risiko Bencana	167	160.05	157.55	155.05	152.55	150.05	150.05
2.	Nilai SAKIP OPD	75	75	80	81	82	85	85
3.	Persentase Capaian Kinerja Program	88%	88%	89%	90%	91%	92%	92%
4.	Persentase Temuan Materil	2%	2%	1,60%	1,20%	0,90%	0,50%	0,50%

Sumber: Arsip Data BPBD 2018-2023

Berdasarkan tabel diatas, menyatakan bahwa penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini di tujukkan dengan akumulasi pencapaian indikator program yang ada atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kerja yang diinginkan pada akhir periode tertuang pada RPJMD dapat dicapai.

Program yang dilaksanakan seperti mitigasi merupakan salah satu upaya mitigasi banjir dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya bencana banjir. Jadi, koordinasi BPBD dengan instansi lainnya karena masing-masing SKPD ini melakukan upaya-upaya mitigasi pencegahan sebelum terjadi banjir untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang akan mungkin terjadi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang II Kedaruratan dan Logistik (Kabid II) terkait dengan Evaluasi Kinerja terhadap kualitas kerja dalam mitigasi Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa beliau mengatakan:

“Dari struktur organisasi (BPBD) ada tiga bidang teknis yakni bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari pra nya sendiri berbicara tentang mitigasi, sosialisasi, edukasi dalam rangka pengurangan resiko bencana, mitigasi yang kita lakukan yaitu membentuk desa tangguh bencana dan kami sudah melakukannya karena desa tangguh sendiri berbicara tentang kelompok masyarakat yang terlibat didalamnya, nah kalau ada kejadian, bagaimanakah mereka melakukan jika suatu saat nanti terjadi bencana minimal mereka mempetakan wilayah nya yang dimana jalur wilayah evakuasi nya, dimana titik kumpulnya jika terjadi bencana terutama untuk bencana banjir. Nah kelompok (Desa Tangguh) inilah yang bergerak dalam rangka mengurangi resiko” (Hasil Wawancara dengan S, 6 Juni 2023).

Hasil wawancara diatas, menjaelaskan bahwa BPBD melakukan berbagai upaya mitigasi, sosialisasi, dan edukasi guna mengurangi risiko bencana atau mitigasi bencana. Pada Kelompok Desa Tangguh sendiri bertanggung jawab dalam memetakan wilayah yang terdampak, termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan maka kinerja dari BPBD saat sebelum kejadian banjir melihat sejauh mana persiapan BPBD dalam hal perencanaan, pelathan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghadapi potensi bencana, ini mencakup peninjauan peralatan, peringatan dini, ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Sedangkan, setelah kejadian banjir, mengevaluasi respons BPBD terhadap situasi darurat. Ini meliputi cepatnya tanggapan, kemampuan mereka (BPBD) dalam mengkoordinasikan evakuasi dan bantuan, serta efisiensi dalam mendistribusikan sumber daya seperti makanan, air, obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah banjir, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam persiapan dan respons BPBD terhadap bencana di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan Staf Pegawai Kecamatan Pallangga terkait dengan tanggapan dari pihak Pemerintah Camat tentang evaluasi kinerja dari BPBD terhadap kualitas kerja dalam mitigasi banjir, beliau mengatakan:

“BPBD sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab nya dengan baik dan tanggap. Mereka juga memberikan edukasi, pemahaman dan melakukan sosialisasi dalam rangka mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang akan terjadi di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain itu, BPBD juga sudah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana terutama untuk bencana banjir. Hal itu sangat penting menurut saya mengingat Desa Panakukkang yang kita ketahui itu adalah wilayah yang rawan akan bencana terutama banjir.” (Hasil Wawancara dengan bapak M, 8 Juni 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD selalu siap dan telah menyiapkan banyak hal untuk menghadapi bencana banjir agar dampak yang di timbulkan bencana banjir tidak terlalu besar. BPBD juga selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di terapkan agar proses penanganan yang dilakukan bisa tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa di Desa Panakkukang terkait dengan evaluasi kinerja terhadap kuantitas pegawai dari BPBD dalam mitigasi banjir di desa panakukkang kecamatan pallangga kabupaten gowab beliau mengemukakan:

“Saya melihat kinerja dari BPBD dan pihak Kecamatan Pallangga itu cukup lumayan baik karena selama ini kami membangun kerjasama yang baik antara satu sama lainnya dalam menangani bencana khususnya banjir. Kami juga selalu di bimbing dan mendapatkan pelatihan tentang mitigasi bencana yang diberikan langsung oleh pihak BPBD sendiri. Dalam melakukan hal tersebut kami melaporkan kepada pihak Kecamatan Pallangga yang dimana nantinya pihak tersebut langsung melaporkannya kepada BPBD setempat. BPBD juga turun ke lapangan dan memberi pertolongan pertama bagi yang terdampak banjir di wilayahnya. Sebelum terjadinya banjir BPBD melakukan atau mengantisipasi terhadap banjir melalui yang namanya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang dimana DESTANA ini dibentuk oleh BPBD sendiri.” (Hasil Wawancara dengan SR, 23 Juni 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, maka penulis mengemukakan bahwa kinerja BPBD dinilai lumayan bagus karena terjalinnya kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memberikan bimbingan,

penyuluhan, pelatihan, serta upaya mitigasi melalui pembentukan DESTANA.

Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari BPBD dalam menghadapi dan mengurangi risiko banjir di wilayah kecamatan Pallangga khususnya bagi di Desa Panakukkang. Selaras dengan hasil wawancara sebelumnya, penulis juga telah melakukan wawancara dengan masyarakat yang terdampak banjir di Desa Panakukkang terkait dengan tanggapan mereka terhadap kualitas kerja dari kinerja BPBD dalam melakukan mitigasi banjir beliau mengatakan:

”Kalau dibilang cara kerjanya BPB bersama pak camat dan Pak Desa Panakukkang lumayan bagus karena mereka memberitahu kepada kami cara untuk mengurangi resiko banjir contohnya itu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Desa inikan sudah menjadi desa yang sering banjir apalagi di tahun 2019 itu dek, nah pada tahun itu terjadi banjir yang parah karena ketinggian banjir hampir sepinggang.” (Hasil Wawancara dengan ibu S, 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa BPBD dan pihak yang terkait telah melakukan upaya yang bagus dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara mengurangi resiko banjir. Mereka telah mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, meskipun desa tersebut menghadapi tantangan banjir yang parah, upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait memberikan wawasan kepada masyarakat tentang praktik-praktik pencegahan banjir dapat membantu dalam mengurangi resiko dimasa depan. Untuk lebih rinci terhadap jumlah

kegiatan/program yang dilakukan BPBD dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Daftar Kegiatan/Program dan Pagu Anggaran BPBD

No.	Nama Kegiatan/Program	Pagu Anggaran
1.	Program Mitigasi Bencana	24,527,100,700
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	24,430,300,700
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90,000,000
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60,800,000

Sumber: Data Realisasi BPBD 2021

Berdasarkan tabel diatas menyimpulkan bahwa BPBD bertindak sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui program-program mitigasi yang dijalankan, BPBD berupaya untuk meminimalisir dari dampak yang diakibatkan oleh banjir. Pengeluaran anggaran dari program atau kegiatan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan dalam mitigasi bencana memberikan hasil yang optimal. Selain itu, BPBD juga perlu melakukan evaluasi terhadap program mitigasi yang dijalankan untuk mengevaluasi keberhasilan. Dengan demikian, BPBD dapat terus meningkatkan kualitas dan dampak dari upaya mitigasi yang dilakukan.

b. Kuantitas Kerja

Indikator ini menjelaskan bahwa seberapa cermat seorang pegawai atau badan/instansi dalam melakukan pekerjaannya. Setiap pegawai pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan mitigasi banjir yaitu mencerminkan seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu organisasi yang dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

Kuantitas kerja mengenai banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jika jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai semakin banyak, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ketua kepala sekaligus ketua pelaksana BPBD terkait dengan evaluasi kinerja dalam mitigasi banjir di desa panakukkang kecamatan pallangga kabupaten gowa terhadap kuantitas kerja beliau mengatakan:

“Untuk pegawainya (BPBD) sendiri dalam melakukan tugas, kami memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kuantitas yang baik, sehingga para pegawai senantiasa berusaha memberikan hasil kerja yang baik, dan saya sendiri bangga akan melihat kinerja pegawai saya dalam melakukan pekerjaannya.” (Hasil wawancara dengan bapak IP, 6 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan diatas dengan bapak IP bahwa pegawai dengan kinerja yang baik adalah pegawai yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin. Pegawai BPBD memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu,

yang ditunjukkan oleh upaya mereka dalam memberikan hasil kerja yang memuaskan. Kepala pelaksana BPBD juga merasa bangga dengan kinerja para pegawai nya dalam menjalankan pekerjaan mereka. Berikut uraian ttentang indikator pencapaian evaluasi terhadap jumlah kinerja pegawai BPBD dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Jumlah Pencapaian Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai BPBD

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahapan awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sesuai Permendagri No 13 Tahun 2016			
			Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Rn	Target	Rn
Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparat/Personil Siaga Bencana	100%	100%	4.216.100.000	100%	4.187.298.00
	Jumlah Kawasan Evakuasi Bencana					

Sumber: Arsip BPBD 2019-2020

Berdasarkan dari tabel jumlah pencapaian terhadap kinerja pegawai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Gowa menjelaskan bahwa bahwa indikator ini mengukur suatu keberhasilan dari pegawai BPBD telah menjalankan program atau kegiatan didalam

penanganan banjir dengan baik, hal itu dibuktikan oleh adanya evaluasi terhadap target kinerja dari masing-masing pegawai BPBD.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kabid II Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan evaluasi kinerja terhadap kuantitas kerja dari BPBD dalam mitigasi banjir di desa panakukkang kecamatan pallangga kabupaten gowa beliau mengatakan:

“Tindakan pengurangan resiko yang telah diambil sudah berhasil dalam mengurangi jumlah resiko yang muncul. Hal ini menunjukkan efektivitas dari upaya mitigasi dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kami (BPBD) atau pihak lainnya. Pengurangan resiko tersebut dapat berdampak positif pada keamanan dan keberlangsungan masyarakat di wilayah tersebut apalagi pada wilayah di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga”. (Hasil Wawancara dengan “S” 6 Juni 2023).

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurangan resiko yang berhasil dan peningkatan kecepatan dalam pelaporan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan bencana. Tetap melanjutkan upaya pengurangan resiko dan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Penulis telah melakukan wawancara dengan staf pegawai Kecamatan Pallangga terkait dengan tanggapan yang diberikan oleh pihak Kecamatan terhadap kuantitas kerja dari kinerja BPBD dalam mitigasi banjir, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya dari BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Gowa ini terutama untuk wilayah di Desa Panakukkang Kecamatan

Pallangga sudah tanggap dan cepat, karena mereka menyiapkan persiapannya berupa melakukan kordinasi dengan pihak terkait salah satunya kami disini , penyiapan alat, dan manajemen penanganan kebencanaan.” (Hasil wawancara dengan “M” 8 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan M dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa telah tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga. Upaya tersebut melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, serta persiapan alat dan manajemen penanganan kebencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa terkait dengan tanggapan tentang evaluasi kinerja terhadap kuantitas dari BPBD dalam melakukan mitigasi banjir di Desa Panakukkang, beliau mengatakan:

“Dalam urusan memberikan bantuan peralatan seperti tempat penampungan sementara, peralatan penyelamatan, dan dukungan logistik lainnya, mereka cukup cepat dan berupaya untuk membantu serta mendukung mereka yang terdampak banjir di Desa ini.” (Hasil wawancara dengan “S” 23 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengemukakan bahwa Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan indikator kinerja yang relevan dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam situasi darurat, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat mempercepat respons dan penanganan terhadap dampak banjir, serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian,

pengukuran kinerja BPBD dan Pemerintah Kecamatan Pallangga melalui persiapan sarana dan prasarana yang disediakan untuk mereka yang terdampak banjir menunjukkan komitmen dan upaya nyata dalam penanggulangan bencana serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas tentang evaluasi kinerja dalam mitigasi banjir tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan teori menurut Sondang P. Siagian (Nirmala, Jaelan Usman, 2020) yaitu ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan; (1) faktor waktu; (2) faktor kecermatan; (3) faktor gaya pemberian pelayanan. Berikut juga hasil wawancara dengan masyarakat yang terdampak, beliau mengatakan:

“kami masyarakat disini sangat terbantu dan mengapresiasi mengenai relawan yang datang membantu dan kami meresponnya dengan baik”. (Hasil wawancara dengan “S” 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara informan S disimpulkan bahwa kehadiran BPBD, relawan-relawan yang terlibat dan respons positif masyarakat saling terkait dan memperkuat upaya pengurangan resiko dan pemulihan dalam situasi yang sulit. Kolaborasi dan kerjasama antara BPBD, Pihak Kecamatan Pallangga, relawan yang terkait dan masyarakat berperan penting dalam membangun kekuatan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.

c. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas merupakan suatu bentuk konsisten dalam bekerja dan dapat berkeja dengan akurat. Seberapa jauh pegawai mampu melakukan pekerjaanya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Pelaksanaan tugas itu sendiri berisi dari kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi agar teratur, terarah, dan terencana agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tugas dalam penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai banjir agar masyarakat paham akan bahaya terjadinya bencana banjir. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD adalah dengan memberikan kesiapsiagaan, prosedur evakuasi, dan praktik mitigasi bencana banjir serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak mengenai penanggulangan bencana. Dalam hal ini, terdapat beberapa program mitigasi bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Gowa dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Jumlah Program Mitigasi Bencana Banjir

No.	Program Mitigasi Bencana Banjir
1.	Sosialisasi
2.	Edukasi
3.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
4.	Sarana dan Prasarana

Sumber: Data Sekunder BPBD 2021

BPBD berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bencana banjir, melalui program yang dilakukan seperti sosialisasi, edukasi, membangun DESTANA dan memberikan sarana dan prasarana agar mereka berusaha meningkatkan kesiapsiagaan dan pemahaman tentang tindakan pencegahan.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan saat melakukan penelitian dengan ketua kepala BPBD Kabupaten Gowa terkait dengan evaluasi kinerja dari BPBD dalam melakukan pelaksanaan tugas mitigasi banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, beliau mengatakan:

“Kami membuat kelompok (Desa Tangguh) yang dimana kami mengaktifkan agar pada saat kejadian mereka tidak lagi kaget karena mereka sudah melakukan simulasi atau mitigasi tentang bagaimana saat kejadian apa yang mereka perbuat misalnya mereka melakukan jalur evakuasi kemudian ada titik kumpul dan disitulah mereka membuat dapur umum. Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat. kami hanya mendukung dengan memberikan sarana terhadap kondisi yang terjadi di wilayah tersebut contohnya kami menyiapkan perahu karet dan lain sebagainya. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik” (Hasil Wawancara dengan IP, 6 Juni 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa BPBD dalam melakukan tugasnya tidak hanya sendiri melainkan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas terhadap upaya mitigasi banjir dengan melakukan kegiatan sosialisasi.

Penulis melakukan wawancara dengan Kabid II Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan evaluasi kinerja dari BPBD dalam melakukan pelaksanaan tugas mitigasi banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, beliau mengatakan

“Langkah konkret yang kami (BPBD) lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, kami tidak ada henti-hentinya memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya mitigasi, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya terutama bagi di Desa Panakukkang.”. (Hasil Wawancara “S” 6 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, BPBD secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana, mengurangi risiko, dan melindungi diri serta lingkungan.

Melalui upaya edukasi, BPBD memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan kebersihan, karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat kerawanan terhadap bencana. Dengan melakukan langkah-langkah konkret ini, BPBD berupaya untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat akan perlunya upaya mitigasi dan pencegahan bencana. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pihak pemerintah melalui BPBD Kabupaten Gowa sebagai pihak yang berkepentingan, melakukan pengedukasian masyarakat di tiap tingkatan administrasi yang lebih kecil yaitu tingkat Desa dan Kecamatan, sehingga setiap masyarakat dapat memahami dengan baik.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Staf Pegawai Kecamatan Pallangga dengan evaluasi kinerja dari BPBD dalam melakukan pelaksanaan tugas mitigasi banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan tugas nya BPBD berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan Pallangga untuk mendirikan yang namanya Posko Siaga Bencana di Kantor Camat Pallangga dan seluruh Kantor Lurah dan Desa.” (Hasil wawancara dengan “M” 8 Juni 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan “M” dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugasnya, BPBD bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan Pallangga untuk mendirikan Posko Siaga Bencana. Posko tersebut didirikan di kantor Camat Pallangga serta seluruh Kantor Lurah dan Desa. tujuan dari posko ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi bencana, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang terdampak. Kerja sama antara BPBD dan Pihak Pemerintah Kecamatan dan Desa ini merupakan langkah positif dalam penanggulangan bencana dan memberikan perlindungan bagi warga yang berada di wilayah terdampak.

Penulis juga melakukan wawancara terkait dengan Sekretaris Desa tentang evaluasi kinerja dari BPBD dalam melakukan pelaksanaan tugas mitigasi banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, beliau mengatakan:

“BPBD memberikan RUMPI DESTANA yang sering kami pakai apabila terjadi bencana, jika ada kegiatan sosial seperti bakti sosial kami dapat berkontribusi sebab DESTANA tersebut bukan hanya untuk banjir saja melainkan untuk bencana lainnya. Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.” (Hasil Wawancara dengan “S” 23 Juni 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka ditarik kesimpulan bahwa BPBD telah memberikan RUMPI (Ruang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana) kepada DESTANA yang sering digunakan dalam situasi bencana. RUMPI tersebut memberikan fasilitas yang memungkinkan DESTANA berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, termasuk partisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial. RUMPI yang diberikan oleh BPBD menjadi sarana yang penting bagi DESTANA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana. Melalui RUMPI, mereka dapat melakukan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan mitigasi serta memberikan kontribusi positif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Dengan meningkatkan pemahaman

masyarakat, mereka dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana serta berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko. Wawancara diatas didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat yang terdampak, beliau mengatakan:

“Kalau ditanya soal pelaksanaan tugas dari BPBD nya sendiri itu sudah cukup bagus menurut saya karena mereka melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bagaimana cara menyiapkan diri sebelum terjadinya banjir (mengurangi resiko), dan mereka juga memberikan kami bantuan seperti mendirikan dapur umum apabila terjadi banjir tapi mereka sudah siap akan hal itu.” (Hasil Wawancara dengan ‘S’ 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa BPBD sudah meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dalam hal pentingnya tentang kebencanaan. BPBD juga memberikan bantuan baik dari bantuan logistik maupun nonlogistik agar masyarakat bisa tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana karena pada evakuasi mandiri ini sangat perlu dalam keluarga.

d. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang di berikan oleh suatu organisasi. Artinya, ketika seorang atau pegawai memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, tetapi jika tidak melakukannya atau pada kenyataannya hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai, maka akan mendapatkan konsekuensi. Indikator ini menjelaskan bahwa setiap

melakukan pekerjaan atau kegiatan harus mempunyai kesadaran yang dimiliki terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar dapat memastikan pekerjaan tersebut diselesaikan dengan baik. Tanggung jawab ini menjadi sangat penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPB) Kabupaten Gowa dikarenakan tugas mereka sendiri berkaitan dengan khalayak banyak pada kasus ini ialah bencana banjir.

Tabel 3.8 Jumlah Data Kejadian Banjir Tahun 2019-2020

Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Penyebab Bencana	Jumlah		Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian
				Terdampak	Mengungsi	Meninggal		
Pallangga	Desa Panakukkang	Banjir	Rusaknya Bendungan Jenelata	45 Rumah	Nihil	Nihil	Rp 45.000.000	
Somba Opu	Kelurahan Tamarunang	Banjir	Intensitas Hujan dan Bukaannya DAM Bili-Bili	320 Rumah	14 Korban	Nihil	Rp 320.000.000	
Total				365 Rumah	14 Korban	Nihil	Rp 365.000.000	

Sumber: Arsip Data BPBD 2019-2020

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa Banjir yang melanda Kabupaten Gowa telah terjadi di beberapa lokasi salah satunya Kecamatan Somba Opu dan Pallangga yang memberikan dampak besar terhadap kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir sendiri, yang dimana total kerugiaan tersebut sebanyak Rp 365.0000.0000 dan

merusak 365 area terdampak. Dalam hal ini BPBD selaku *leading sector* melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak banjir salah satunya dengan dilaksanakannya mitigasi sebagai suatu tindakan pengurangan resiko bencana banjir.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan saat melakukan penelitian dengan ketua kepala sekaligus ketua pelaksana BPBD Kabupaten Gowa, terkait dengan evaluasi kinerja terhadap tanggung jawab dari BPBD dalam melakukan program kegiatan Di Kabupaten terutama di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga, beliau mengatakan:

“Tindakan pengurangan resiko yang telah diambil telah berhasil dalam mengurangi jumlah resiko yang muncul dan kami melihat bahwa pelaporan terkait bencana semakin cepat kenapa demikian karena hal ini menunjukkan efektivitas dari upaya mitigasi dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait salah satunya kami (BPBD) disini.” (Hasil Wawancara “IP” 6 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mengemukakan bahwa Tindakan pengurangan resiko yang telah diambil telah berhasil dalam mengurangi jumlah resiko yang muncul. Hal ini menunjukkan efektivitas dari upaya mitigasi dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau lembaga lainnya. Pengurangan resiko tersebut dapat berdampak positif pada keamanan dan keberlangsungan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk memperkuat instansi dimasing-masing tingkat Pemerintahan dalam lingkup kewasan, baik ditingkat Kabupaten, Kelurahan dan Desa serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Partisipasi semua elemen masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif. Penting membangun komitmen dan kerjasama antara pihak instansi yang terlibat dan masyarakat untuk menghindarkan Kabupaten Gowa khususnya untuk wilayah Kelurahan/Desa dari bencana banjir. Pernyataan berikut didukung dengan hasil wawancara dengan Kabid II Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan kinerja pegawai BPBD terhadap tanggung jawab dalam melakukan mitigasi banjir abeliau mengatakan:

“Berbicara soal tanggungjawab dari apa yang kami lakukan, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik karena kami sudah melakukannya dengan tanggap dan cepat apabila ada pelaporan atau panggilan darurat, kami (BPBD) sudah siap siaga akan hal yang kami lakukan terutama dalam masalah penanganan ataupun mitigasi dari bencana banjir itu sendiri .” (Hasil Wawancara “S” 6 Juni 2023).

Berdasarkan dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting dalam penanganan dan mitigasi bencana banjir. Kecepatan BPBD dalam merespon pelaporan atau panggilan darurat terkait dengan banjir menunjukkan kesiapan dan efektifitas mereka dalam menghadapi situasi darurat. Penulis juga melakukan wawancara terkait dengan tanggapan evaluasi kinerja BPBD terhadap tanggung jawab

dalam melakukan mitigasi banjir dengan Staf Pegawai Kecamatan Pallangga beliau mengatakan:

“Kalau ditanya soal tanggungjawab dari apa yang mereka lakukan (BPBD sendiri bersama Dinas lainnya), mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing dalam garis satu komando. Mereka juga selalu memberikan arahan yang diberikan saat rapat koordinasi yang dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab setiap instansi/badan yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan atau pengurangan resiko banjir.” (Hasil Wawancara “M” 8 Juni 2023).

Berdasarkan sengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya fokus pada peningkatan rasa tanggungjawab menunjukkan komitmen BPBD dan Dinas lainnya dalam upaya mengurangi resiko banjir. Ini mencerminkan bahwa uapay mereka untuk melindungi masyarakat dan menimimalkan dampak negatif dari bencana banjir.

Wawancara dengan informan tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan teori menurut Sultan (Yusuf, 2018), mengemukakan bahwa tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi kerja mencakup: bekerja secara tekun dan berdedikasi tinggi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, bertanggung jawab, mengkoordinasikan dalam sumber daya organisasi, bekerja secara efisien dan efektif sesuai analisis organisasi, memberikan solusi pada manajemen organisasi sebagai andil tanggung jawab memberdayakan dan mendayagunakan organisasi.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dengan bapak Sekretaris Desa terkait dengan tanggapan tentang evaluasi kinerja BPBD terhadap tanggung jawab dalam mitigasi banjir, beliau mengatakan:

“Tanggungjawab yang ditunjukkan oleh BPBD sudah dianggap cukup bagus karena adanya kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama ini memainkan peran penting dalam menjalankan tanggung jawab penanggulangan bencana secara efektif dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam situasi darurat entah itu saat sebelum maupun sesudah bencana.” (Hasil Wawancara dengan “S” 23 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa melalui kerjasama ini, tanggung jawab BPBD menjadi lebih terbantu dan terpenuhi dengan baik. Sinergi antara berbagai pihak memperkuat upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam mengurangi risiko, memberikan pertolongan pertama, dan pemulihan pasca-bencana.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Masyarakat yang terdampak banjir terkait dengan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap tanggung jawab dari kinerja BPBD dalam melakukan mitigasi banjir di Kabupaten Gowa terutama di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga, beliau mengatakan:

“Tanggung jawab dari apa yang dilakukan oleh BPBD sendiri dan pihak yang terkait itu menurut saya selaku masyarakat disini yaa sudah cukup bagus karena mereka melakukan tugas dan kewajibannya dalam urusan menangani bencana apalagi bencana yang sering terjadi di Desa ini itukan banjir kalau musim hujan yang tinggi.” (Hasil wawancara dengan “S” 26 Juni 2023”).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPBD bersama dengan pihak terkait telah menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dalam menangani bencana, terutama banjir yang sering terjadi di Desa Panakkukang saat musim hujan yang tinggi. Hal ini

mencerminkan bahwa upaya dari mereka dalam merespons dan menghadapi bencana serta memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat yang terdampak. Kepatuhan dalam melaksanakan tugas ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan membantu masyarakat mengatasi bencana dengan lebih efektif.

Berdasarkan dari pernyataan diatas terdapat jumlah realisasi fisik yang dikeluarkan oleh BPBD dalam melakukan mitigasi bencana banjir di setiap wilayah yang terkena bencana, maka dari itu jumlah realisasi fisik tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Daftar Realisasi Fisik BPBD

Program dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Banjir	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Banjir	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Banjir

Sumber: Data Realisasi BPBD 2021

Program dan pelayanan yang disediakan oleh BPBD, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama pada bencana banjir. Tanggung jawab mereka mencakup sosialisasi, edukasi, membentuk relawan serta penyediaan bantuan dan dukungan saat terjadi bencana.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Peneliti melakukan penelitian terhadap evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan memperoleh hasil berupa Faktor Penghambat serta Faktor Pendukung dari kinerja BPBD dalam melakukan mitigasi banjir yakni sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

1. Terjalannya Kerjasama Berbagai Pihak

Kerjasama yang terjalin antara BPBD dengan berbagai pihak merupakan faktor pendukung yang penting dalam upaya mitigasi banjir di Kabupaten Gowa khususnya untuk wilayah Kelurahan/Desa. Hubungan kerjasama ini sebagai aktifitas pencarian, penyelamatan, penyuluhan, sosialisasi serta pemberian bantuan kepada korban yang terdampak banjir di wilayah yang rawan akan kerentanan bencana. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua kepala pelaksana BPBD Kabupaten Gowa terkait dengan faktor

pendukung dari kinerja BPBD dalam melakukan mitigasi banjir di Kabupaten Gowa khususnya di Desa Panakukkang, beliau mengatakan:

“Karena Kabupaten Gowa ini termasuk Kabupaten dengan tingkat kerawanan akan bencana terutama banjir yang cukup tinggi. Kami bekerjasama dengan pihak yang terkait seperti Basarnas, Dinas Sosial, Damkar, Timsar dan pihak lainnya untuk saling membahu satu sama lain dalam menangani masalah tersebut.” (Hasil Wawancara “IP” 6 Juni 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan “S” Maka dapat disimpulkan bahwa terjalinnya kerjasama ini dengan berbagai pihak lainnya bertujuan untuk saling bekerjasama dalam menangani masalah banjir. Penanggulangan atau upaya pengurangan resiko bencana haruslah dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait agar dapat bersatu dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing instansi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu staf personil Damkar terkait dengan kerjasama atau kolaborasi dalam melakukan upaya pengurangan resiko penanggulangan bencana banjir, beliau mengatakan:

“Soal kerjasama yang terjalin dengan pihak BPBD, saya pribadi melihat bahwa kerjasama yang dilakukan antara BPBD dengan Damkar disini sangat bagus, karena kami salaing membahu satu sama lain dalam melakukan upaya pengurangan resiko yang dimana hal tersebut sebagai bagian dari mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana khususnya pada bencana banjir.” (Hasil Wawancara “K” 9 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama staf personil Damkar menjelaskan bahwa kerjasama yang terjalin antara BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) telah berjalan dengan baik, kerjasama ini terlihat efektif karena keduanya saling berkoordinasi dan bekerjasama secara sinergis dalam upaya pengurangan resiko serta meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh banjir.

BPBD dan Damkar saling melengkapi dalam berbagai aspek, seperti perencanaan mitigasi bencana, pengumpulan informasi, serta pelatihan bersama untuk penanganan darurat. Dengan saling mendukung dan berbagai pengetahuan, BPBD dan Damkar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kerugian material dan nyawa manusia akibat bencana banjir.

b. Faktor Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Besaran potensi ancaman bencana geologi ini perlu diimbangi dengan pengetahuan, pemahaman pencegahan dan pengurangan resiko bencananya. Pengetahuan bencana di Indonesia masih belum terjangkau untuk masyarakat awam. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan bencana dengan pengetahuan yang

ada di tingkat masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi banjir di Kabupaten Gowa terutama bagi wilayah di Desa Panakukkang, sangat kurang.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ketua Kepala Pelaksana BPBD, terkait dengan faktor penghambat dari kinerja BPBD dalam melakukan mitigasi banjir di Kabupaten Gowa khususnya di Desa Panakukkang, beliau mengatakan:

“Yang menjadi faktor penghambat didalam kinerja kami melakukan mitigasi banjir adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan penanganan banjir contohnya menjaga lingkungan, membuang sampah sembarangan. Mereka harus sadar akan terjadi bencana apalagi daerah yang rawan akan terjadinya banjir dengan tingkat yang cukup lumayan tinggi terutama untuk wilayah di Desa Panakukkang. Beberapa wilayah Dusun yang sering terjadi banjir setiap tahunnya apabila cuaca yang cukup ekstrim mengakibatkan terjadinya banjir yang perlu pencegahan dan kesiapsiagaan untuk membuat atau mengaktifkan namanya pos tangguh.” (Hasil Wawancara “IP” 6 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya kesadaran akan miigasi banjir Masyarakat harus memahami bahwa langkah-langkah sederhana seperti menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan dapat membantu mengurangi resiko banjir terutama di wilayah yang rawan banjir seperti di Desa Panakukkang. Kesadaran ini penting karena mereka berada dalam risiko yang cukup tinggi.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja menurut Mangkunegara dalam (Septian, 2021) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kualitas kerja yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur kinerja BPBD dalam melakukan kegiatan program mitigasi bencana khususnya bencana banjir yang berdasarkan dengan aturan ada dan menunjukkan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BPBD melakukan berbagai upaya baik dari penanggulangan atau mitigasi, sosialisasi, dan edukasi guna mengurangi dampak risiko bencana, terutama untuk bencana banjir. Kelompok Desa Tangguh bertanggung jawab dalam memetakan wilayah yang terdampak, termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana banjir. Kelompok ini berperan dalam mengurangi risiko bencana melalui upaya mitigasi yang dilakukan.

Evaluasi Kinerja dilakukan oleh BPBD dengan melihat realisasi program kerja yang tercantum dalam RENJA. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, dan bisa dilakukan dalam bentuk persentase pencapaian kinerja dari setiap SKPD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan dan mencapai hasil yang diharapkan. BPBD selalu siap dan telah menyiapkan banyak hal untuk menghadapi bencana banjir, dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah

diimplementasikan, berikut beberapa data terhadap penanganan bencana yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diuraikan dalam bentuk gambar tabel berikut ini:

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Mekanisme dan Prosedur Penanganan Bencana

Gambar 3.4 Mekanisme dan Prosedur Penanganan Bencana

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Staf Sub Bid/Satgas PB	Rescuer, Tagana dll	Instansi Teknis Terkait	Kasubid Kedaruratan	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Kalaksa BPBD	Sekrelaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima informasi masuk dan melakukan konfirmasi tentang kejadian bencana	☐								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	Piket Posko Siaga 24 Jam
2	Menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana kepada pimpinan (Kepala Pelaksana segera memerintahkan pelaksanaan Kaji Cepat Bencana)			☐	☐	☐	☐	☐		Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Melaksanakan Kaji Cepat Bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk merangkulangi bencana	☐			☐	☐	☐	☐		Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, kamera dan kendaraan bermotor	30 menit	Surat Peintah Tugas	Satgas PB melakukan kaji cepat bencana
4	Menyampaikan Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana				☐	☐	☐	☐		Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana	
5	Memutuskan konsep penanganan bencana dan status bencana							☐		Hasil kaji cepat bencana, Radio HT, telepon, ATK dan Komputer	10 menit	Disposisi	
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meminta instansi terkait untuk berkoordinasi dengan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana (instansi terkait menyiapkan pasukan/satgas, sarana prasarana dan logistik yang diperlukan sesuai hasil kaji cepat bencana)			☐				☐		Hasil kaji cepat bencana, Radio HT, telepon, ATK dan Komputer	20 menit	Disposisi	Tim teknis terkait al : Dinsos, Dinkes, DPUPPB, DKP, Satpol PP, Dishb, BPKAD, PMI, TNI, Polri dll
7	Memerintahkan kepada BPBD untuk mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana bersama instansi terkait dan masyarakat							☐		Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Disposisi	
8	mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana dan mengerahkan pasukan, sarana prasarana dan logistik ke lokasi bencana							☐		Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer peralatan rescue, mobil rescue, logistik	10 menit	Surat Perintah Tugas	Pengerahan pasukan sarana prasarana dan logistik dikoordinir BPBD
9	melaksanakan evakuasi korban perbaikan segera sarana prasarana publik vital, dan bantuan logistik kepada korban bencana serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana	☐	☐	☐	☐	☐				Peralatan rescue, mobil rescue, logistik	60 menit	penanganan bencana dan korban bencana	Penanggulangan Bencana dikomando dan dikoordinir BPBD
10	melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana							☐	☐	ATK dan Komputer	60 menit	laporan	
11	mendokumentasikan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana				☐					ATK dan Komputer	10 menit	laporan terdokumentasi	

Sumber: Arsip BPBD

b) Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana

Gambar 3.5 Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Staf Sub Bkd/Satgas PB	Kasubid Kedaruratan	Kabid. Kedaruratan & Logistik	Kalaksa BPBD	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima informasi masuk dan melakukan konfirmasi tentang kejadian bencana	□						Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	Piket Posko Siaga 24 Jam
2	Menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana	□	□	□	□	□		Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk segera melaksanakan kaji cepat bencana		□	□	□			Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Disposisi	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik merugaskan Kasubid Kedaruratan untuk segera melakukan kaji cepat bencana		□	□	□			Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Disposisi	
5	Kasubid Kedaruratan memberi perintah kepada Satgas PB untuk segera melaksanakan kaji cepat bencana di lokasi bencana	□	□					Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Surat Perintah Tugas	
6	Satgas PB melaksanakan kaji cepat bencana untuk menganalisa tingkat kerusakan, korban, kerugian dan kebutuhan, kemudian segera melaporkan hasil kaji cepat kepada Kasubid Kedaruratan	□	□					Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	24 jam	Hasil Kaji Cepat Bencana	
7	Kasubid Kedaruratan membuat laporan atas hasil kaji cepat bencana kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		□	□	□			Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	30 menit	Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana	
8	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaporkan hasil kaji cepat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD			□	□			Laporan hasil kaji cepat bencana	5 menit	Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana	
9	Kepala Pelaksana BPBD membuat laporan dan merumuskan rekomendasi atas status kejadian bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD (Setda)				□	□		Laporan hasil kaji cepat bencana	10 menit	Laporan dan Rekomendasi Status Bencana	
10	Kepala BPBD (Setda) menerima laporan dan rekomendasi mengenai status kejadian bencana					□		laporan dan rekomendasi hasil kaji cepat bencana	10 menit	Laporan Kepada Bupati	Kepala BPBD (Setda) sesuai arahan Bupati memberikan arahan kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam menanggapi Kejadian Bencana
11	Bupati menerima laporan mengenai analisa dan rekomendasi atas status kejadian bencana					□		laporan dan rekomendasi hasil kaji cepat bencana	10 menit	Disposisi	Bupati memberi arahan atas penanganan kejadian bencana
12	Kasubid Kedaruratan merekomendasikan hasil kaji cepat bencana	□						Laporan hasil kaji cepat bencana	5 menit	Hasil Kaji Cepat Bencana Terdokumentasikan	

Sumber: Arsip BPBD

c) Standar Operasional Prosedur (SOP) Terhadap Penyelamatan dan Evakuasi Korabn Bencana

Gambar 3.6 Mekanisme Penyelamatan dan Evakuasi Korabn Bencana

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Staf Sub Bid/Satgas PB	Rescue	Kasubid Keselamatan	Kabid. Mediarutan dan Logistik	Kalaksa BPBD	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima informasi masuk dan melakukan konfirmasi tentang kejadian bencana								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	15 menit	Terdapat Bencana	Piket Posko Siaga 24 Jam
2	Menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana kepada pimpinan (Kepala Pelaksana segera memerintahkan pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi)								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Menyapkan Surat Tugas dan Perangkat yang diperlukan untuk kemudian menuju lokasi kejadian.								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, kamera, kendaraan bermotor dan peralatan rescue	30 menit	Surat Perintah Tugas, Peralatan Rescue	
4	Melakukan Koordinasi dan menentukan metode penyelamatan dan evakuasi korban								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, kamera, kendaraan bermotor dan peralatan rescue		Laporan Hasil Evakuasi dan Penyelamatan	Melaksanakan Penyelamatan dan Evakuasi Korban (Waktu Pelaksanaan Tidak Bisa Ditentukan)
5	Setelah Korban ditemukan hidup kemudian dilakukan pertolongan pertama untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, kamera, kendaraan bermotor dan peralatan rescue	30 menit	Korban ditemukan	Apabila ditemukan telah meninggal dunia maka diserahkan ke instansi terkait/rumah sakit untuk penanganan selanjutnya
6	Melaporkan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban								ATK dan Komputer	60 menit	laporan	
11	mendokumentasikan laporan pelaksanaan penanganan bencana								ATK dan Komputer	10 menit	laporan terdokumentasi	

Sumber: Arsip BPBD

2. Kuantitas Kerja

Instansi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperhatikan indikator kuantitas kerja menurut Mangkunegara dalam (Septian, 2021) bahwa kinerja BPBD dinilai dari kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, karena peningkatan kecepatan dalam pelaporan dan pengurangan risiko yang berhasil menunjukkan adanya kemajuan dalam mitigasi bencana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan indikator kinerja yang relevan dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam situasi darurat, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mempercepat respons dan penanganan dampak bencana, serta membantu masyarakat yang terdampak. Dalam kesimpulannya menunjukkan bahwa kinerja BPBD diukur dari berbagai aspek, termasuk kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, efisiensi dalam pelaporan, penyediaan sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan pihak terkait dan masyarakat. Semua upaya ini penting dalam menjaga kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut.

3. Pelaksanaan Tugas

Pada indikator pelaksanaan tugas menurut Mangkunegara (Septian, 2021) menunjukkan evaluasi kinerja dari BPBD dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang dimana BPBD secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana, mengurangi risiko, dan melindungi diri serta lingkungan.

BPBD juga memberikan fasilitas seperti RUMPI kepada DESTANA, yang membantu mereka berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, termasuk partisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial. RUMPI tersebut menjadi sarana yang penting bagi DESTANA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana. BPBD memberikan bantuan logistik dan non-logistik kepada masyarakat agar mereka bisa menjadi tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Evakuasi mandiri menjadi hal yang sangat penting bagi keluarga dalam menghadapi bencana. Melalui upaya edukasi, BPBD berusaha untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat akan pentingnya mitigasi dan pencegahan bencana serta memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam melakukan mitigasi bencana.

4. Tanggung Jawab

Tindakan pengurangan risiko yang telah diambil oleh BPBD dan lembaga terkait berhasil dalam mengurangi jumlah risiko yang muncul. Ini menunjukkan efektivitas dari upaya mitigasi dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam indikator tanggung jawab menurut Mangkunegara (Septian, 2021) Kecepatan BPBD dalam merespon pelaporan atau panggilan darurat terkait banjir juga

menunjukkan kesiapan dan efektivitas mereka dalam menghadapi situasi darurat. Tanggung jawab yang diemban oleh BPBD sangat penting dalam penanganan dan mitigasi bencana banjir.

Adanya fokus pada peningkatan rasa tanggung jawab ini mencerminkan upaya mereka untuk melindungi masyarakat dari bencana banjir. Kerjasama antara berbagai pihak juga memberikan dukungan yang baik bagi BPBD dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sinergi ini memperkuat upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam mitigasi, memberikan pertolongan pertama, dan melakukan pemulihan pasca-bencana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

2. Kualitas Kerja

BPBD melakukan evaluasi kinerja dengan melihat realisasi program kerja dalam RENJA dan penilaian terhadap pencapaian sasaran RENSTRA. BPBD telah melakukan berbagai upaya mitigasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menghadapi risiko banjir. Edukasi masyarakat juga menjadi fokus dalam mengurangi risiko bencana tersebut. Dengan penerapan SOP dan evaluasi kinerja yang dilakukan, BPBD berupaya untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam menghadapi bencana banjir.

3. Kuantitas Kerja

Pentingnya kinerja pegawai dalam penanggulangan bencana, upaya pengurangan risiko, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai. Kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bencana dan membangun ketangguhan komunitas. Semua upaya ini memiliki peran penting

dalam memitigasi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar.

4. Pelaksanaan Tugas

BPBD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Kolaborasi dengan pemerintah setempat, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta pemberian bantuan yang tepat menjadi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Semua upaya ini sangat penting dalam memitigasi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan meningkatkan ketangguhan komunitas dalam menghadapi tantangan bencana.

5. Tanggung Jawab

Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD dan pihak terkait telah menunjukkan hasil yang efektif. Kesiapan, tanggung jawab, dan sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi bencana dan melindungi masyarakat. Dalam mengurangi risiko dan meningkatkan resiliensi, kerjasama antarpihak terbukti menjadi langkah yang sangat penting dan berhasil dalam menghadapi tantangan bencana banjir.

Adapun kesimpulan dari Faktor Penghambat dan Pendukung Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

1) Faktor Penghambat

Kesadaran akan mitigasi banjir sangat penting dalam upaya mengurangi resiko banjir, terutama di wilayah Desa Panakukkang. Masyarakat harus memahami bahwa langkah-langkah sederhana, seperti menjaga lingkungan, memiliki dampak besar. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi banjir dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk melindungi wilayah mereka dari banjir.

2) Faktor pendukung

Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani masalah banjir sangat penting dan bermanfaat. Dengan bekerjasama, pihak-pihak terkait dapat saling berkontribusi dengan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman mereka untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam mitigasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak yang terkait yakni :

- 1) Untuk BPBD sebaiknya tingkatkan koordinasi antar instansi dan lintas sektor dalam perencanaan program mitigasi
- 2) Untuk masyarakat penulis berharap bahwa tingkat kesadarannya lebih ditingkatkan akan pentingnya partisipasi aktif dalam program mitigasi banjir
- 3) Untuk peneliti berikutnya berharap dapat memperbaiki dan menambah lebih banyak sumber referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Akbar, Amir Tjoneng, S. (2021). Analisis Indeks Bahaya Erosi Das Kampili Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal AGrotekMAS*, 2(3), 68–75.
- Amelia, I. (2019). *Kesiapsiagaan Masyarakat Kampung Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Banjir Dusun Parangma'lengu Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(2337–5736), 1–9.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bencana Alam Kabupaten Gowa, 2019.
- Cahyadi, H. (2018). *Sistem Penanganan Korban Pascabencana Terhadap Keselamatan Masyarakat Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*.
- Fahlevi, M. R. (2019). Strategi Adaptasi Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda di Dalam Menghadapi Banjir. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 154–168. reza_fahlevy@gmail.com
- Laia, S., Reaksi, Z., & H, F. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 4(2), 246–257.

- Mangkunegara. A. A. Anwar Prabu, (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mahpudin. (2021). Evaluasi Kinerja Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5724418>
- Nasution, F. R., & Sinaga, R. S. (2017). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 3(1), Halaman 1–7.
- Nirmala, Jaelan Usman, A. M. (2020). *Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba*. 1(3).
- Nurdin, L., & G, D. A. A. (2020). Serta Pengendalian Banjir Perkotaan. *Evaluasi Dan Perbaikan Sistem Drainase Serta Pengendalian Banjir Perkotaan*, 1(01), 11–20.
- Nurfatihah, S. (2019). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa. In *skripsi Ilmu Pemerintahan* (Issue 2).
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 334–350. Suartini, K., Noak, P.

A., Winaya, I. K., Ilmu, F., Politik, I., & Udayana, U. (2014). *Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Badung Dalam Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014.*

Syarif, M. M. (2021). Analisis Potensi Sebaran Bahaya Banjir Akibat Kegagalan Tampungandan Bendungan Bili-Bili. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(3), 1316. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2298>

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB

Wahyuni, S. (2019). Pembelajaran Rain Water Harvesting Pada Mata Pelajaran Biologi Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Biologi*, 10(2), 74. <https://doi.org/10.17977/um052v10i2p74-84>

Wulandari, A. (2020). *Kajian Pemanfaatan Lahan Kawasan Rawan Banjir Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.*

L

A

M

P

I

R

A

N





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **16407/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1371/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 28 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR FITRIANI**
Nomor Pokok : 105641105219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EVALUASI KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 30 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/570/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kab. Gowa

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 16407/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NUR FITRIANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 17 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105641105219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sirajuddin Rani

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa"

Selama : 12 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023
Pengkuit :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 15 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal



Dokumentasi wawancara bersama Kepala sekaligus Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa



Dokumentasi wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid II) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa



Dokumentasi wawancara bersama staf personil Damkar Kabupaten Gowa



Dokumentasi wawancara bersama Sekretaris Desa Panakukkang Kabupaten Gowa



Dokumentasi wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Panakukkang



Dokumentasi Pengambilan Data



Dokumentasi penyediaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)



Dokumentasi foto kejadian banjir di Desa Panakukkang pada tahun 2019



Saluran Drainase di Desa Panakukkang



Dokumentasi penyediaan perahu karet



Dokumentasi penyediaan dapur umum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Fitriani
Nim : 105641105219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya

Makassar, 03 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 02-Aug-2023 01:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2140323438

File name: BAB_I_SKRIPSI_31.docx (479.72K)

Word count: 1330

Character count: 8788



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab I

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Komputer Indonesia
Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



Nur Fitriani 105641105219 Bab
II
by Tahap Tutup



Submission date: 02-Aug-2023 01:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2140323852

File name: BAB_II_SKRIPSI_33.docx (57.19K)

Word count: 1873

Character count: 12325



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab II

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	journal2.um.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
5	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%
6	adoc.pub Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab
III
by Tahap Tutup



Submission date: 02-Aug-2023 01:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2140323978

File name: BAB_III_SKRIPSI_39.docx (20.21K)

Word count: 804

Character count: 5437

Nur Fitriani 105641105219 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



6% INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab
IV
by Tahap Tutup



Submission date: 02-Aug-2023 02:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2140324229

File name: BAB_IV_SKRIPSI_36.docx (203.23K)

Word count: 6868

Character count: 45751



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
2	id.123dok.com Internet Source	1%
3	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1%
6	bpbdspn.wordpress.com Internet Source	<1%
7	gowakab.go.id Internet Source	<1%
8	www.devotranslation.com Internet Source	<1%
9	mafiadoc.com Internet Source	<1%



10

repository.upi.edu
Internet Source

<1%

11

frpbkabtangerang.wordpress.com
Internet Source

<1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab

V

by Tahap Tutup



Submission date: 02-Aug-2023 02:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2140324381

File name: BAB_V_SKRIPSI_40.docx (17.06K)

Word count: 635

Character count: 4155



Dipindai dengan CamScanner

Nur Fitriani 105641105219 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Dipindai dengan CamScanner



Nur Fitriani., Lahir di Sungguminasa pada tanggal 17 Desember 2001. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Saharuddin Haris dan Ibu Yurmiati Tabris. Saat ini penulis beralamat di Jl. Sirajuddin Rani, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan di TK Ar-Rahimi pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang

sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Maccini Ayo pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sungguminasa yang berada di Gowa dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Yapip Sungguminasa dan tamat pada tahun 2019 Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul penelitian Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa saja yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.